

**PROSEDUR PENDAFTARAN LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT DI BADAN KESATUAN BANGSA
KABUPATEN DELI SERDANG**

SKRIPSI

OLEH

MASA BARUS

10 851 0037

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN



**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2014**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

PROSEDUR PENDAFTARAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI BADAN KESATUAN BANGSA KABUPATEN DELI SERDANG

SKRIPSI

Oleh :

MASA BARUS

10 851 0037



**Skripsi sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan
Gelar Sarjana di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Medan Area**

**FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS MEDAN AREA**

M E D A N

2 0 1 4

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PROSEDUR PENDAFTARAN LEMBAGA SWADAYA
MASYARAKAT DI BADAN KESATUAN BANGSA
KABUPATEN DELI SERDANG

Nama Mahasiswa : MASA BARUS

NPM : 10 851 0037

Program Studi : ILMU PEMERINTAHAN

Disetujui Oleh :
Komisi Pembimbing

Warjo, SS.MA.Ph.D
Pembimbing I

Drs. Syafruddin Ritonga, MAP
Pembimbing II

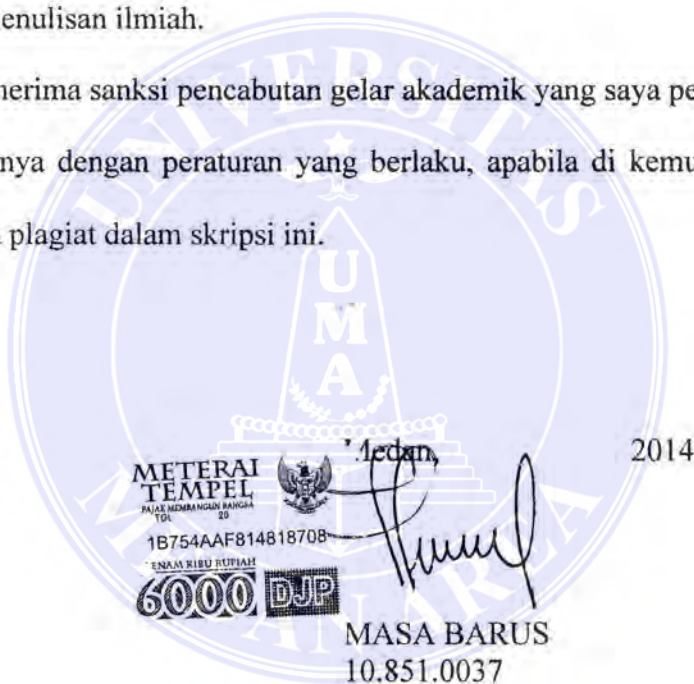


DR. Abdul Kadir, M.Si
Dekan

LEMBAR PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Mbaruai Kecamatan Biru-biru Kabupaten Deli Serdang, pada tanggal 12 Desember 1983 dari Ayah Teka Barus dan Ibu Pilem Perangin-angin. Penulis merupakan putra ke-5 (lima) dari 5 (lima) bersaudara.

Tahun 2001 Penulis lulus dari SMU Karya Pembangunan Deli Tua dan pada Tahun 2010 terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Medan Area.



ABSTRAK

PROSEDUR PENDAFTARAN LEMBAGA SWADAYA MASYARAKAT DI BADAN KESATUAN BANGSA KABUPATEN DELI SERDANG

OLEH
MASA BARUS
NPM : 10 851 0037
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

Kantor Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang bergerak dalam Wilayah Tugas dan Fungsi kerja yang begitu luas dan kompleks, yaitu bergerak di Bidang Kesatuan Bangsa, Bidang Hubungan Antar Lembaga, Bidang Demokratisasi, dan Bidang Perlindungan Masyarakat. Terlebih pada era reformasi seperti sekarang ini, banyak masyarakat aktif dalam mendirikan lembaga maupun ormas yang dirasakan kebablasan. Reformasi diartikan sebagai kebebasan tanpa batas sehingga mengakibatkan terjadinya pengenduran sendi-sendi berbangsa dan bernegara. Pengenduran ini akibat dari kiris multidimensi yang berawal dari krisis moneter tahun 1997/1998, sesungguhnya juga problematika mendasar adalah munculnya gejala disintegrasi bangsa, yang ditandai dengan keinginan untuk memisahkan diri dari NKRI, disamping itu juga muncul masalah pertikaian diantara warga yang SARA yang tentu sangat sulit untuk di selesaikan.

Permasalahan yang diajukan adalah "Bagaimana upaya Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang dalam melakukan pembimbingan, monitoring, pengawasan terhadap keberadaan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang".

Hasil penelitian dan pembahasan menjelaskan dari hasil temuan penelitian didapat bahwa Pelayanan Pemerintah Daerah Kabupaten Deli serdang terhadap masyarakat khusus masyarakat LSM tergolong baik dan memuaskan serta dalam pelayanan prima. Partisipasi masyarakat kalangan LSM merasa terpanggil untuk melakukan control pemerintahan secara positif berdasar peraturan yang berlaku. Dari temuan penelitian didapat bahwa hubungan antara lembaga Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli serdang terhadap Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) tergolong baik dan harmonis. Penelitian ini juga menyarankan agar Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli serdang perlu inovatif dan kreatif dalam menjalankan program agar lebih memberikan hasil yang diharapkan. Seperti meningkatnya partisipasi LSM hal ini dapat dilakukan sosialisasi yang lebih intensif dapat meningkatkan pengetahuan LSM dan selanjutnya dapat meningkatkan kesadaran para masyarakat.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Kata Kunci: Badan Kesatuan Bangsa, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

ABSTRACT

REGISTRATION PROCEDURE OF NON GOVERNMENT ORGANIZATION AT KESBANG (UNITY OF NATION) REGENCY OF DELI SERDANG

BY
MASA BARUS
NPM (REG. NO) : 10 851 0037
STUDY PROGRAM OF GOVERNMENT SCIENCE

The Unity of Nation Office (Kesbang) of Deli Serdang Regency that cover the wide and complex work task and function area in the unity of nation, inter-institution relationship, democratization and society protection sectors. In the reformation era, more of society active in build institution or society organization felt too far. Reformation is interpreted as freedom without limitation that causes the looseness of the pillar of nation and state. This is consequence of multidimensional crisis since the monetary crisis in 1997/1998. Actually, the basic problem is the symptom of national disintegration indicated by the desire for separation from Unitary Nation of Republic of Indonesia in addition to the dispute issue of SARA (Ethnic, Religion and Race) that cannot be neglected.

The submitted problem is "What the effort of Unity of Nation (Kesbang) Office of Deli Serdang Regency in direction, monitoring and supervision to the existence of the Non Government Organization (LSM) in the regency area of Deli Serdang.

The results of research and discussion describe the result of the finding of research that the Local Government service of Deli Serdang Regency to the society specially to the non government organization is good and satisfied with the prime service. The non government organization encouraged to participate to control the government positively based on valid regulation. Based of the results of research it indicates that the relationship between Unity of Nation (Kesbang) office of Deli Serdang Regency and the non government organization is good and harmonious. This research suggest that the Unity of Nation (Kesbang) office of Deli Serdang Regency must be more innovative and creative in implement the program for the achievement the determined goal such as the increasing of participation of non government organization by intensive socialization in order to increase the knowledge of non government organization and to increase the society awareness.

Keywords : Unity of Nation (Kesbang), non Government Organization (NGO)

KATA PENGANTAR

Dengan ucapan syukur kepada Tuhan yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmad-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini guna melengkapi tugas-tugas yang diwajibkan kepada Mahasiswa Universitas Medan Area pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Jurusan Ilmu Pemerintahan untuk memperoleh gelar kesarjanaan.

Dalam penulisan skripsi ini penulis mengalami banyak kesulitan seperti keterbatasan waktu, kurangnya literatur yang diperlukan, keterbatasan kemampuan menulis sendiri dan sebagainya, namun demikian dengan kemauan keras yang didorong oleh rasa tanggung-jawab dan dilandasi itikad baik, akhirnya kesulitan tersebut dapat diatasi.

Adapun judul yang diajukan sehubungan dengan penyusunan skripsi ini adalah **“Prosedur Pendaftaran Lembaga Swadaya masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang”**.

Dalam penulisan skripsi ini banyak pihak telah penulis buat sibuk maka pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima-kasih kepada pihak-pihak tersebut, terutama kepada :

- Bapak DR. ABDUL KADIR,M.SI, selaku Dekan di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Medan Area,
- Ayahanda dan Ibunda tercinta yang telah mengasuh, mendidik, membimbing dan membesarkan penulis, serta tak lupa do'a restu yang tulus selama penulis menuntut ilmu.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Bapak W. ARHO,SS,MA,Ph,D. selaku Dosen Pembimbing I penulis.

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

- Bapak Drs. H. Syafruddin Ritonga, MAP selaku Dosen Pembimbing II penulis.
- Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik serta semua unsur staf Administrasi Universitas Medan Area.
- Rekan-rekan se-almamater.

Demikianlah dahulu penulis sampaikan, dan semoga tulisan ini dapat bermanfaat bagi kita semua.



Medan, 1 April 2014

Penulis

MASA BARUS
NPM : 10 851 0037

DAFTAR ISI

	halaman
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR.....	vii
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	5
C. Pembatasan Masalah	6
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	6
E. Kerangka Pemikiran	7
BAB II. URAIAN TEORITIS	10
A. Pengertian Masyarakat.....	10
B. Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat.	11
C. Pengertian Kebijakan Publik (<i>Public Policy</i>).....	17
D. Jenis Kebijakan Publik	21
E. Sifat Kebijakan Publik.....	23
BAB III. METODOLOGI PENELITIAN	25
A. Populasi dan Sampel	25
B. Metode Pengumpulan Data	25

C. Variabel dan Definisi Operasional	26
D. Teknik Analisis Data	26
BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	28
A. Deskripsi Umum Lokasi Penelitian	28
B. Hasil Penelitian dan Pembahasan	35
BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	52
LAMPIRAN-LAMPIRAN	



DAFTAR TABEL

	<i>Halaman</i>
Tabel 1 : Deskripsi Informasi Wawancara.....	35
Tabel 2 : Daftar Lembaga Swadaya Masyarakat	36



DAFTAR GAMBAR

Halaman

Gambar 1	: Struktur Organisasi Badan Kesatuan Kabupaten Bangsa Deli Serdang	29
----------	---	----



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) atau sering disebut dengan nama lain *Non Government Organization (NGO)* atau organisasi non pemerintah (Ornop) dewasa ini keberadaannya sangat mewarnai kehidupan politik di Indonesia. Diperkirakan saat ini lebih dari 10.000 ormas dan LSM beroperasi di Indonesia baik ditingkat nasional, propinsi maupun di tingkat kabupaten/kota, dimana dari tahun ketahun jumlah ini semakin bertambah.

Perkembangan politik, demokrasi, pembangunan ekonomi dan kemajuan teknologi informasi merupakan faktor-faktor yang mendorong terus bertambahnya jumlah Ormas dan LSM di Indonesia.

Bergulirnya era reformasi menggantikan era orde baru diikuti pula dengan peningkatan jumlah Ormas dan LSM. Jika pada tahun 1997 ditaksir ada sekitar 4000-7000 ormas dan LSM, maka pada tahun 2012 jumlah ormas dan LSM menurut Departemen Dalam Negeri menjadi sekitar 13.500 LSM. Iklim segar yang dibawa oleh angin reformasi menciptakan keleluasaan yang luas dalam upaya-upaya penyaluran aspirasi.

Kebebasan menyampaikan pendapat, berekspresi, berserikat dan berkumpul dijamin penuh oleh Undang-Undang. Dominasi pemerintah pada masa orde baru yang dijalankan melalui depolitisasi atau partisipasi terkontrol yang bertujuan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Untuk Menjamin

hegemoni pemerintah dan mengontrol Masyarakat melalui

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 8/8/23
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

pembatasan kegiatan partai politik dan organisasi sosial dengan dalih menciptakan kestabilan politik, semakin terkikis oleh tuntutan-tuntutan untuk mengurangi fungsi kontrol pemerintah terhadap Masyarakat dan di lain pihak meningkatkan kemandirian Masyarakat dalam segala aspek kehidupan yang meliputi bidang politik, ekonomi, sosial-budaya dan bidang-bidang lainnya.

Ruang politik yang semakin terbuka lebar pada era reformasi, seiring dengan diberikannya kebebasan yang luas memberikan kesempatan pada kelompok-kelompok Masyarakat untuk berekspresi dalam berbagai bentuk organisasi sosial politik non pemerintah dengan mengusung berbagai asas dan tujuan masing-masing. Tidak ada lagi hegemoni ideologi yang dijalankan lewat berbagai Undang-Undang yang mendudukan Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi setiap organisasi seperti pada masa orde baru yang menyebabkan aktifitas LSM dan organisasi sosial politik lainnya berada dalam ruang yang sempit.

Ormas dan LSM secara umum diartikan sebagai sebuah organisasi yang didirikan oleh perorangan ataupun sekelompok orang yang secara sukarela memberikan pelayanan kepada Masyarakat umum tanpa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari kegiatannya. Ormas dan LSM merupakan lembaga/organisasi non partisan yang berbasis pada gerakan moral (*moral force*) yang memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan politik. Ormas dan LSM dipandang mempunyai peran signifikan dalam proses demokratisasi.

Jenis organisasi ini diyakini memiliki fungsi dan karakteristik khusus dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
berbeda dengan organisasi pada sektor politik-pemerintah maupun swasta (*private*)

sector), sehingga mampu menjalankan tugas tertentu yang tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi pada dua sektor tersebut.

Kemunculan Ormas dan LSM merupakan reaksi atas melemahnya peran kontrol lembaga-lembaga Negara, termasuk partai politik, dalam menjalankan fungsi pengawasan ditengah dominasi pemerintah terhadap Masyarakat. Sehingga pada awal sejarah perkembangan lahirnya Ormas dan LSM, terutama yang bergerak dibidang sosial politik, tujuan utama pembentukan Ormas dan LSM adalah bagaimana mengontrol kekuasaan Negara, tuntutan pers yang bebas, tuntutan kebebasan berorganisasi, advokasi terhadap kekerasan Negara dan kebijakan-kebijakan yang merugikan rakyat.

Pola hubungan LSM pada masa ini sebagai pola hubungan yang konfliktual, dimana dari sisi pemerintah juga berupaya mencampuri dan mempengaruhi organisasi, cara kerja dan orientasi ormas dan LSM. Namun dalam sistem politik yang demokratis, Ormas dan LSM dan pemerintah dapat bersama-sama memberikan sumbangan penting dalam hal peningkatan hak-hak rakyat.

Perubahan yang dibawa era reformasi menyebabkan wajah kekuasaan menjadi tidak sesolid dulu, sehingga Masyarakat mempunyai kesempatan yang lebih besar untuk mengungkapkan pikiran dan tuntutan nya. Dengan kehidupan politik yang lebih demokratis saat ini, membuat banyak Ormas dan LSM mulai meninggalkan strategi konfrontatif dengan pemerintah, dengan cara berusaha menjalin kerjasama dengan pemerintah ketika peluang politik tersedia. Ormas dan LSM saat ini tidak lagi memandang pemerintah setajam dulu, meskipun demikian

masih terdapat kesadaran luas di kalangan Ormas dan LSM bahwa pemerintah tetap potensial menjadi pengekang rakyat.

Salah satu kepentingan sosial politik keberadaan Ormas dan LSM dewasa ini semakin mengemuka tatkala keluarnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi KeMasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah.

Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 33 tahun 2012 yang dikeluarkan pada tanggal 23 april 2012, mungkin belum seluruh Masyarakat Indonesia, khususnya semua Ormas dan LSM di negeri ini mengetahuinya. Pada konsiderannya Permendagri 33 Tahun 2012 ini merevisi Permendagri Nomor 5 tahun 1986 tentang ruang lingkup, tatacara pemberitahuan kepada pemerintah serta papan nama dan lambang organisasi yang tidak sesuai dengan kebutuhan dan dinamika Organisasi KeMasyarakatan serta prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Dengan diundangkannya Permendagri nomor 33 tahun 2012 ini artinya mewajibkan daftar ulang bagi seluruh organisasi keMasyarakatan di seluruh Indonesia. Yang menarik dari Permendagri 33 Tahun 2012 adalah bahwa cakupan pengertian ormas dan LSM yang berbasis anggota, dengan struktur berjenjang, maka dalam pendaftarannya harus memenuhi persyaratan setengah jumlah provinsi untuk tingkat nasional, setengah jumlah kabupaten/kota untuk tingkat provinsi, setengah jumlah kecamatan untuk tingkat kabupaten, dan setengah jumlah desa

Pada Pasal 9 dari peraturan ini ada 22 point mempersyaratkan bagi tiap Orkesmams untuk melengkapinya, dengan persyaratan yang semakin sulit ini sudah berfungsi sebagai filter untuk menyaring dan menjaring keberadaan ormas dan LSM di Indonesia yang semakin menjamur dan tidak terkendali. Secara perlahan, nantinya akan banyak Organisasi KeMasyarakatan yang terseleksi oleh peraturan ini

Penolakan atas permohonan pendaftaran ada 8 point, terutama ormas yang tidak berasaskan Pancasila. Kemudian tindakan dari instansi yang berwenang mengeluarkan surat keterangan terdaftar, antara lain; melakukan cek lapangan tentang keberadaan Organisasi KeMasyarakatan tersebut, dan kewenangan untuk membekukan Surat keterangan terdaftar.

Oleh sebab itu maka penelitian skripsi ini mengambil judul tentang “Prosedur Pendaftaran Lembaga Swadaya Masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang”.

B. Perumusan Masalah

Setiap kejadian yang timbul pada diri manusia maka akan mengakibatkan timbulnya permasalahan, dan biasanya dengan kemampuannya dia akan berusaha untuk memecahkan masalah tersebut secara rasional dan objektif.

Masalah adalah setiap kesulitan yang menggerakkan manusia untuk memecahkannya, masalah harus dirasakan sebagai rintangan yang mesti dilakukan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
(Dengan jalan mengatasinya) apabila kita ingin berjalan terus.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area
Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

Selanjutnya setiap permasalahan yang ada agar tidak mengambang dan membingungkan maka dibuatlah suatu perumusan masalah, yang bertujuan agar masalah tersebut jelas batasannya, kedudukannya dan sekaligus mencari alternatif pemecahannya.

Berdasarkan pemikiran di atas dirumuskan masalah sebagai berikut “Bagaimana prosedur pendaftaran lembaga swadaya Masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang”.

C. Pembatasan Masalah

Ditinjau dari judul yang penulis sajikan dapat diambil suatu pembatasan masalah yaitu :

1. Sejauh manakah usaha-usaha yang dilakukan Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang dalam pelaksanaan pendaftaran LSM.
2. Penelitian dilakukan pada tahun 2013.

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui prosedur pendaftaran lembaga swadaya Masyarakat di Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang

Adapun kegunaan penelitian skripsi ini bertujuan untuk :

1. Memperoleh data dan informasi sekaligus membuktikan tentang peranan Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang dalam hal pelaksanaan pendaftaran LSM.

gelar kesarjanaan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Medan Area.

3. Penelitian ini diharapkan dapat merupakan sumbangan pemikiran kepada pihak yang berwenang untuk dipakai dalam merumuskan kebijaksanaan dimasa yang akan datang.

E. Kerangka Pemikiran

Sebelum melangkah lebih lanjut, seorang peneliti harus terlebih dahulu menentukan kerangka dasar teori sebagai landasan berpijak dalam melaksanakan penelitian. Menurut Arikunto (2006:65):

Kerangka dasar teori adalah suatu hal yang diyakini kebenarannya oleh peneliti yang harus dirumuskan secara jelas yang nantinya berguna untuk memperkuat permasalahan dan membantu peneliti dalam memperjelas menetapkan objek penelitian, instrumen, pengumpulan data serta wilayah pengambilan data.

Pembangunan nasional yang bertujuan untuk mencapai tujuan nasional terdapat dalam Undang-Undang Dasar alinea ke-IV yaitu: Kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian dan abadi dan keadilan sosial.

Tujuan Nasional di atas sangat terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan di setiap tingkatan, dari tingkatan pusat sampai ketingkat yang

UNIVERSITAS MEDAN AREA
terendah serta semua sisi Masyarakat seperti pemberdayaan LSM.

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

Keikutsertaan Masyarakat melalui LSM secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemeliharaan serta pengembangan hasil-hasil pembangunan, salah satu kunci keberhasilan dari setiap usaha pembangunan.

Menurut Winardi (2009:54) keikutsertaan atau partisipasi dapat didefinisikan sebagai berikut :

Partisipasi secara formal dapat didefinisikan sebagai turut sertanya seorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangsih pada proses pembuatan keputusan, terutama mengenai persoalan dimana keterlibatan pribadi yang bersangkutan terdapat dan orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut.⁵

Begitupun berhasilnya kegiatan yang dilakukan lebih banyak ditentukan oleh faktor orang-orang yang menjadi aparat pemerintahan. Kemampuan manajerial dari aparat pemerintahan dalam merangkul dan memberdayakan lembaga swadaya Masyarakat ataupun kelompok Masyarakat sangatlah dibutuhkan, karena bagaimanapun partisipasi yang dibangun tidak akan dapat berfungsi dengan baik tanpa adanya keterbukaan kemampuan dan kegigihan dari aparat pemerintah dan Masyarakat itu sendiri.

Karena itu untuk menjelaskan hal-hal di atas, maka peranan komunikasi antara pemerintahan dan Masyarakat haruslah terbangun dengan baik.

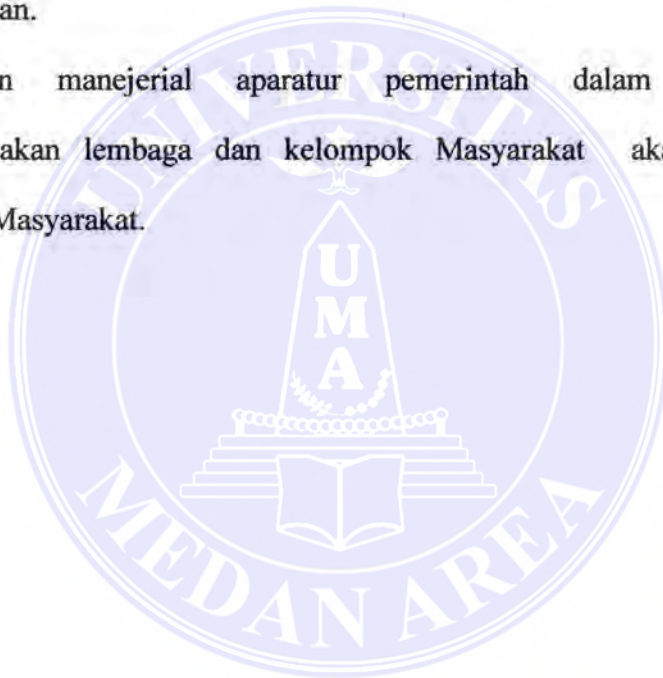
Handoko (2001:272) mengatakan bahwa: “Komunikasi adalah proses pemindahan pengertian dalam bentuk gagasan atau informasi dari seseorang ke orang lain”.

Perpindahan pengertian tersebut melibatkan lebih dari sekedar kata-kata yang digunakan dalam percakapan, tetapi juga ekspresi wajah, intonasi, titik vokal

data, tetapi sangat tergantung pada ketrampilan-ketrampilan tertentu (membaca, mendengar, berbicara, melihat dan lain-lain), untuk membuat suksesnya pertukaran informasi.

Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa :

1. Pembangunan nasional bertujuan untuk mencapai tujuan nasional.
2. Partisipasi Masyarakat melalui LSM merupakan salah satu kunci keberhasilan pembangunan.
3. Kemampuan manajerial aparatur pemerintah dalam rangka dan memberdayakan lembaga dan kelompok Masyarakat akan menentukan partisipasi Masyarakat.



BAB II

URAIAN TEORITIS

A. Pengertian Masyarakat

Pengertian Masyarakat, penulis mengutip pendapat seorang ahli dibidang sosiologi, yaitu Shadily (2000:31) mengatakan bahwa yang dimaksud dengan “Masyarakat adalah golongan besar atau kecil terdiri dari beberapa manusia, yang dengan atau karena sendirinya bertalian secara golongan dan pengaruh mempengaruhi satu sama lain”.

Dapat diketahui bahwa Masyarakat adalah suatu kelompok manusia yang terdiri dari berbagai golongan yang saling mempengaruhi.

Sedangkan menurut Iver dan Page yang dikutip Soekanto (2002:22) memberikan definisi Masyarakat sebagai berikut :

Masyarakat ialah suatu sistem dari kebiasaan dan tata cara, dari wewenang dan kerjasama antara berbagai kelompok dan penggolongan dari pengawasan tingkah laku serta kebebasan-kebebasan manusia. Keseluruhan yang selalu berubah ini kita namakan Masyarakat. Masyarakat merupakan jalinan hubungan sosial. Dan Masyarakat selalu berubah.

Walaupun definisi yang diberikan para sarjana sosial tersebut berlainan akan tetapi pada dasarnya isinya adalah sama, yaitu Masyarakat mencakup beberapa unsur antara lain :

1. Manusia hidup bersama, berarti orangnya minimum dua atau lebih
2. Bercampur untuk waktu yang cukup lama. Kumpulan manusia tidak sama dengan kumpulan benda mati. Oleh karena manusia adalah bertambah, yang menghasilkan manusia-manusia baru yang dapat berbicara. Mereka juga berkeinginan untuk menyampaikan kesan-kesan atau perasaan-perasaan kepada



teman-temannya. Sebagai akibat itu timbullah sistem komunikasi dan timbul peraturan-peraturan yang mengatur hubungan antar manusia dalam kelompoknya.

3. Mereka sadar bahwa mereka merupakan suatu kesatuan.
4. Mereka merupakan suatu sistem hidup bersama untuk menimbulkan kebudayaan. Oleh karena setiap anggota kelompok merasa dirinya terikat satu sama lain.

B. Organisasi Masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat

1. Pengertian Organisasi Masyarakat

Organisasi Masyarakat adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh Masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, tujuan yang berfungsi sebagai sarana partisipasi Masyarakat dalam pembangunan bangsa dan negara. Sebagai makhluk yang selalu hidup bersama-sama, manusia membentuk organisasi sosial untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang tidak dapat mereka capai sendiri.

Pasal 1 butir 1 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pendaftaran Organisasi KeMasyarakatan Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah mengatakan "Organisasi KeMasyarakatan yang selanjutnya disebut orkemas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota Masyarakat warga Negara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan dalam

rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila”.

Sebagai warga Masyarakat dan warga negara setiap manusia Indonesia harus memegang semangat kekeluargaan dan semangat gotong-royong. Hal ini berarti bahwa kita sebagai warga negara harus mengadakan organisasi dan saling membantu. Negara kita yang berasaskan kekeluargaan, menghormati hak pribadi. Sebaliknya hak pribadi itu dilaksanakan dengan memperhatikan kepentingan bersama yaitu kepentingan nasional. Oleh karena itu, kepentingan nasional yang merupakan kepentingan bersama itu harus didahulukan daripada kepentingan pribadi atau golongan.

Berikut ini adalah jenis-jenis organisasi di Masyarakat dari sudut pandang yang berbeda-beda :

1. Berdasarkan Proses Pembentukan

a. Organisasi Formal :

Organisasi formal adalah organisasi yang dibentuk secara sadar dan dengan tujuan-tujuan tertentu yang disadari pula dan diatur dengan ketentuan-ketentuan yang formal. Organisasi formal memiliki suatu struktur yang terumuskan dengan baik, yang menerangkan hubungan-hubungan otoritasnya, kekuasaan, akuntabilitas dan tanggung jawabnya. Struktur yang ada juga menerangkan bagaimana bentuk saluran-saluran melalui apa komunikasi berlangsung. Kemudian menunjukkan tugas-tugas terspesifikasi bagi masing-masing anggotanya. Hierarki sasaran organisasi

jabatan, serta prasarat lainnya terurutkan dengan baik dan terkendali. Selain itu organisasi formal tahan lama dan mereka terencana dan mengingat bahwa ditekankan mereka beraturan, maka mereka relatif bersifat tidak fleksibel.

b. Organisasi Informal :

Organisasi Informal adalah organisasi yang dibentuk tanpa disadari sepenuhnya, tujuan-tujuannya juga tidak begitu jelas. Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) juga tidak jelas. Hubungan yang terjalin juga sifatnya pribadi dan sifatnya tidak formal. Kebanyakan organisasi informal ini terbentuk dalam organisasi formal, yang anggotanya terdiri atas karyawan yang ada pada lembaga tersebut. Mereka secara pribadi ingin mengadakan kegiatan tertentu secara bersama-sama yang harus diorganisir. Contoh organisasi informal, misalnya organisasi kesenian karyawan. Setiap karyawan mempunyai keinginan untuk mengembangkan bakat di bidang kesenian. Dari masing-masing pribadi berkumpul untuk membentuk kegiatan kesenian, bisa juga arisan karyawan, dan lain-lain.

2. Berdasarkan Tujuannya

a. Organisasi Sosial :

Organisasi sosial adalah organisasi yang mempunyai tujuan sosial. Organisasi semacam ini tidak berharap keuntungan dalam bentuk materi. Tujuan utama organisasi ini untuk melayani kepentingan Masyarakat, tanpa menghitung untung-rugi. Organisasi semacam ini banyak muncul di

UNIVERSITAS MEDAN AREA
tengah-tengah Masyarakat. Mereka yang mendirikan organisasi semacam

ini biasanya mempunyai jiwa sosial yang tinggi. Orang-orang yang mempunyai kepedulian terhadap kondisi Masyarakatnya. Contoh organisasi sosial adalah organisasi dalam bentuk yayasan penyandang cacat, panti asuhan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) dan lain-lain.

b. Organisasi Bisnis :

Organisasi yang tujuannya mendapatkan keuntungan. Organisasi bisnis semacam ini dikelola oleh perusahaan perseorangan dan ada pula yang berupa perusahaan milik bersama. Kegiatan semacam ini bisa berupa perusahaan produksi, perdagangan, maupun jasa.

3. Berdasarkan Hubungannya dengan Pemerintah

a. Organisasi Resmi :

Organisasi resmi adalah organisasi yang terdaftar di lembaga pemerintahan. Organisasi ini bisa langsung dibentuk oleh pemerintah atau berhubungan dengan pemerintahan. Organisasi yang langsung dibentuk oleh pemerintahan karena segala aturan dan pelaksanaannya diatur langsung oleh pemerintah. Tetapi tidak dibentuk oleh pemerintahan. Kegiatan ini memiliki hubungan yang erat untuk membantu kelancaran dan pelaksanaan dalam kegiatan pemerintahan. Organisasi resmi yang dibentuk oleh pemerintah misalnya organisasi di Departemen Pendidikan, Departemen Agama, dan lain-lain. Organisasi yang terdaftar di pemerintah, tetapi tidak dibentuk oleh pemerintah, misalnya Muhammadiyah, NU, dan lain-lain. Organisasi ini pelaksanaannya tidak diatur oleh pemerintah, tetapi diatur

UNIVERSITAS MEDAN AREA
sendiri. Hanya saja, keberadaannya banyak membantu dalam kegiatan

pemerintahan.

b. Organisasi Tidak Resmi :

Organisasi tidak resmi adalah organisasi yang tidak ada hubungannya dengan pemerintahan dan tidak terdaftar di pemerintahan. Organisasi ini hanya semacam organisasi biasa untuk pengembangan suatu bakat tertentu sehingga keberadaannya tidak harus izin atau tidak perlu untuk didaftar di pemerintahan.

2. Pengertian Lembaga Swadaya Masyarakat

Istilah Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) berasal dari suatu seminar yang diselenggarakan Sekretariat Bina Desa (SBD) di Ungaran, Jawa Tengah 1978. Di kalangan Perserikatan Bangsa-bangsa (PBB), kelompok, lembaga atau organisasi tersebut disebut *Non Government Organization* (NGO) yang kemudian dalam suatu konferensi (1976) Wahana Lingkungan Hidup (WALHI) diterjemahkan menjadi Organisasi Non Pemerintah (disingkat ORNOP). Namun ada kejanggalan dengan istilah tersebut. Pengertian organisasi Non Pemerintah dapat mencakup berbagai organisasi yang luas (semua organisasi yang bukan organisasi Pemerintah) baik organisasi bisnis, kalangan pers, paguyuban seni, olah raga dan lain-lain, padahal dengan NGO yang dimaksud lebih khusus yaitu yang berhubungan langsung dengan pembangunan.

Selanjutnya dalam sejarah pergerakan, kita mengenal istilah "Non" dan "Co". Pada waktu pendudukan Belanda ada kelompok Masyarakat yang bekerjasama dengan Belanda disebut "golongan Co" dan ada kelompok yang menolak kerjasama disebut

UNIVERSITAS MEDAN AREA
 Masyarakat yang tidak mau bekerjasama dengan Pemerintah. Padahal untuk mencapai

tujuan dari kelompok, lembaga atau organisasi tersebut, yaitu meningkatkan keswadayaan dan kemandirian Masyarakat yang dilayani, sering perlu banyak bekerjasama dengan Pemerintah.

Dalam mencari istilah Indonesia bagi NGO, ditemukan istilah yang sering dipakai oleh Kementrian Kerjasama International Jerman (Barat) yaitu *Self Help Promoting Institute* (SHPI) dan *Self Help Organization* (SHO), masing-masing dimaksudkan sebagai lembaga yang didirikan dengan tujuan menolong yang lain, sedang yang kedua dimaksudkan untuk menolong diri sendiri. Sayogyo kemudian memperkenalkan istilah Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat (LPSM) untuk SHPI dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) untuk SHO.

Istilah LSM lalu didefinisikan secara tegas dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) No. 8 tahun 1990, yang ditujukan kepada gubernur di seluruh Indonesia tentang Pembinaan Lembaga Swadaya Masyarakat. Lampiran II dari Inmendagri menyebutkan bahwa LSM adalah organisasi/lembaga yang anggotanya adalah Masyarakat warganegara Republik Indonesia yang secara sukarela atau kehendak sendiri berniat serta bergerak di bidang kegiatan tertentu yang ditetapkan oleh organisasi/lembaga sebagai wujud partisipasi Masyarakat dalam upaya meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Masyarakat, yang menitikberatkan kepada pengabdian secara swadaya.

Dalam Pilot Proyek Hubungan Bank dan Kelompok Swadaya Masyarakat (PPHBK) istilah LSM mencakup pengertian LPSM (Lembaga Pengembangan Swadaya Masyarakat) dan KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat). PPHBK yang dikelola oleh Bank Indonesia dimaksudkan menghubungkan Bank (formal) dengan

UNIVERSITAS MEDAN AREA
KSM (non formal) dalam bidang permodalan. Sejak diperkenalkan Bank Indonesia

tahun 1988, skema HBK telah berjalan sangat baik, hingga September 2001, dilaksanakan di 23 propinsi, mencakup lebih dari 1000 kantor bank partisipan, 257 LPSM, 34.227 kelompok swadaya Masyarakat dengan anggota sekitar 1.026.810 KK, menyalurkan kredit (akumulasi) Rp 331 milyar, memobilisasi tabungan beku (akumulasi) Rp 29,5 milyar, dan tingkat pengembalian kredit 97,3%.

Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa pengertian LSM mencakup dua kategori yaitu KSM dan LPSM. Disamping itu ada kategori ketiga yang disebut LSM Jaringan, yaitu suatu bentuk kerjasama antara LSM dalam bidang kegiatan atau minat tertentu.

C. Pengertian Kebijakan Publik (*Public Policy*)

Secara umum istilah kebijakan dan kebijaksanaan seringkali dipergunakan secara bergantian. Kedua istilah ini terdapat banyak kesamaan dan sedikit perbedaan, sehingga tak ada masalah yang berarti bila kedua istilah itu dipergunakan secara bergantian. Pengertian istilah kebijakan dan kebijaksanaan juga terdapat dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia.

1. Kebijakan kepandaian, kemahiran.

Kebijakan berarti:

- a. Hal bijaksana, kepandaian menggunakan akal budinya (pengalaman dan pengetahuannya).
- b. Pimpinan dan cara bertindak (mengenai pemerintahan, perkumpulan dan sebagainya).

c. Kecakapan bertindak bila menghadapi orang lain (dalam kesulitan dan

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

sebagainya). (Poerwadarminta, 2003: 115).

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

2. Istilah kebijaksanaan biasanya digunakan untuk perbuatan yang baik, menguntungkan atau positif.

Kebijaksanaan berarti:

- a. Pandai; mahir; selalu menggunakan akal budinya.
- b. Patah lidah; pandai bercakap-cakap. (Poerwadarminta, 2003:115).

Sedangkan *policy* berasal dari bahasa Latin *politeia* yang berarti kewarganegaraan. Karena *policy* dikaitkan dengan pemerintahan, maka lebih tepat jika diterjemahkan sebagai kebijaksanaan dan bukan kebijakan (Suryaningrat, 2009 : 11).

Berbeda dengan Winarno (2002: 14) dalam bukunya “Teori dan Proses Kebijakan Publik”, ia mempergunakan istilah kebijakan, Kebijakan digunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah) atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.

Menurut Jones, istilah kebijakan tidak hanya digunakan dalam praktik sehari-hari namun digunakan untuk menggantikan kegiatan atau keputusan yang sangat berbeda (Winarno, 2002 : 16).

Berkaitan dengan pengertian kebijakan tersebut, Friedrich dalam Winarno (2002 : 16) memberikan pengertiannya sebagai berikut : Kebijakan sebagai suatu arah tindakan yang diusulkan oleh seseorang, kelompok atau pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu, yang memberikan hambatan-hambatan dan kesempatan-kesempatan terhadap kebijakan yang diusulkan untuk menggunakan dan mengatasi

maksud tertentu. Istilah kebijakan ini lebih tertuju pada kebijakan publik (*public policy*) yaitu kebijakan negara, kebijakan yang dibuat negara.

Kebijakan publik dapat juga berarti serangkaian tindakan yang ditetapkan dan dilaksanakan atau tidak dilaksanakan oleh pemerintah yang mempunyai tujuan tertentu demi kepentingan seluruh Masyarakat. Bentuk kebijakan publik itu bisa berupa Undang-Undang atau peraturan daerah (Perda) dan yang lain (Dewi, 2002 : 1).

Menurut Anderson, dalam Sunggono (2004 : 23) mengatakan bahwa: "*Public Policies are those policies developed by governmental bodies and officials*" (kebijakan publik adalah kebijakan-kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah).

Menurut Anderson dalam Sunggono (2004 : 23), implikasi dari pengertian kebijakan publik tersebut adalah:

1. Bahwa kebijakan publik selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan.
2. Bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah.
3. Bahwa kebijakan itu adalah apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah, jadi bukan merupakan apa yang pemerintah bermaksud akan melakukan sesuatu atau menyatakan akan melakukan sesuatu.
4. Bahwa kebijakan publik itu bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat

UNIVERSITAS MEDAN AREA
negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak

melakukan sesuatu.

5. Bahwa kebijakan pemerintah dalam arti yang positif didasarkan atau selalu dilandaskan pada peraturan perUndang-Undangan dan bersifat memaksa (otoritatif).

Pressman dan Widavsky mendefinisikan kebijakan publik sebagai hipotesis yang mengandung kondisi-kondisi awal dan akibat-akibat yang bisa diramalkan. Kebijakan publik itu harus dibedakan dengan bentuk-bentuk kebijakan yang lain misalnya kebijakan swasta. Hal ini dipengaruhi oleh keterlibatan faktor-faktor bukan pemerintah (Winarno, 2002 :17).

Keterlibatan aktor-aktor dalam perumusan kebijakan publik merupakan ciri khusus kebijakan publik. Hal ini seperti yang diungkapkan David Easton sebagai “penguasa” dalam suatu sistem politik, yaitu para sesepuh suku, anggota-anggota eksekutif, legislatif, yudikatif, penasihatraja dan semacamnya. Menurut Easton, mereka ini merupakan orang-orang yang terlibat dalam masalah sehari-hari dalam suatu sistem politik, diakui oleh sebagian besar anggota sistem politik, mempunyai tanggung jawab untuk masalah-masalah ini, dan mengambil tindakan-tindakan yang diterima secara mengikat dalam dalam jangka waktu yang lama oleh sebagian besar anggota sistem politik selama mereka bertindak dalam batas-batas peran yang diharapkan (Winarno, 2002 : 18).

Dari pengertian kebijakan publik yang diuraikan diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Kebijakan publik dibuat oleh pemerintah yang berupa tindakan-tindakan

2. Kebijakan publik baik untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu itu mempunyai tujuan tertentu.
3. Kebijakan publik ditujukan untuk kepentingan Masyarakat.

Fungsi utama dari negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijaksanaan bagi seluruh Masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya, yaitu:

1. Memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator).
2. Memajukan perkembangan dari Masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai stimulator).
3. Memadukan berbagai aktivitas (negara sebagai koordinator).
4. Menunjuk dan membagi benda material dan non material (negara sebagai distributor). (Sunggono,2004 : 12).

D. Jenis Kebijakan Publik

Menurut Anderson, kebijakan publik dapat dikelompokkan sebagai berikut:

1. *Substantive Policies and Procedural Policies.*

Substantive Policies adalah kebijakan yang dilihat dari substansi masalah yang di hadapi oleh pemerintah. Misalnya: kebijakan politik luar negeri, kebijakan dibidang pendidikan, kebijakan ekonomi, dan sebagainya. Dengan demikian yang menjadi tekanan dari *substantive policies* adanya pokok masalahnya (*subject matter*) kebijakan.

Procedural Policies adalah suatu kebijakan yang dilihat dari pihak-pihak mana

UNIVERSITAS MEDAN AREA
saja yang terlibat dalam perumusan kebijakan publik, serta cara bagaimana

suatu kebijakan publik diimplementasikan.

2. *Distributive, Redistributive, and Self Regulatory Policies.*

Distributive Policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang pemberian pelayanan atau keuntungan bagi individu-individu, kelompok-kelompok, perusahaan-perusahaan atau Masyarakat tertentu. *Redistributive Policies* adalah kebijakan yang mengatur tentang pemindahan alokasi kekayaan, pemilikan, atau hak-hak di antara kelas-kelas dan kelompok-kelompok penduduk.

Self Regulatory Policies adalah kebijakan yang mengatur tentang pembatasan atau pelarangan perbuatan atau tindakan bagi seseorang atau sekelompok orang.

3. *Material Policies.*

Material policies adalah kebijakan-kebijakan tentang pengalokasian atau penyediaan sumber-sumber material yang nyata bagi para penerimanya, atau mengenakan beban-beban bagi mereka yang mengalokasikan sumber-sumber material tersebut.

4. *Public Goods and Private Goods Policies.*

Public Goods Policies adalah suatu kebijakan yang mengatur tentang penyediaan barang-barang dan pelayanan-pelayanan untuk kepentingan orang banyak. *Private Goods Policies* merupakan kebijakan-kebijakan tentang penyediaan barang-barang atau pelayanan-pelayanan untuk kepentingan perorangan yang tersedia di pasar bebas, dengan imbalan biaya tertentu.

(Sutopo dan Sugiyanto, 2001: 5)

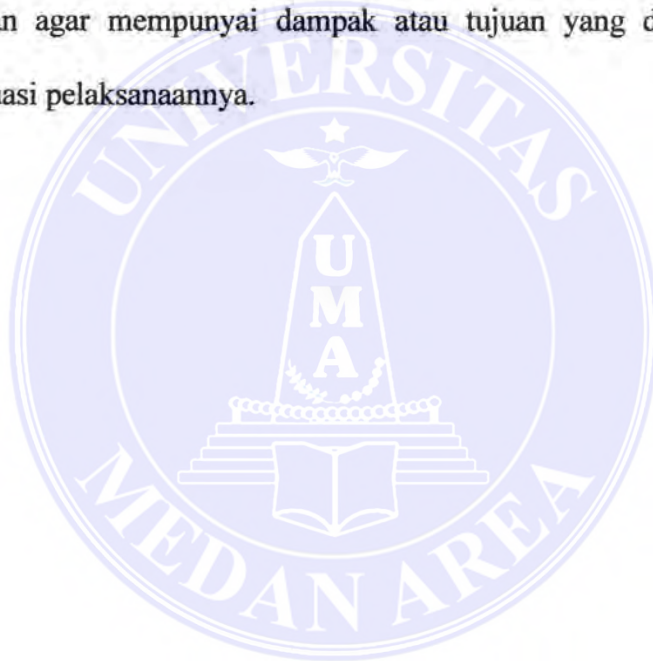
E. Sifat Kebijakan Publik

Menurut Winarno, sifat kebijakan bisa diperinci menjadi beberapa kategori, yaitu :

1. Tuntutan kebijakan (*policy demands*) adalah tuntutan-tuntutan yang dibuat oleh aktor-aktor swasta atau pemerintah, ditujukan kepada pejabat-pejabat pemerintah atau sistem politik.
2. Keputusan kebijakan (*policy decisions*) didefinisikan sebagai keputusan-keputusan yang dibuat oleh pejabat-pejabat pemerintah yang mengesahkan atau memberi arah dan substansi kepada tindakantindakan kebijakan publik. Termasuk dalam kegiatan ini adalah menetapkan Undang-Undang, memberikan perintah-perintah eksekutif atau pernyataan-pernyataan resmi, mengumumkan peraturan-peraturan administratif atau membuat interpretasi yuridis terhadap Undang-Undang.
3. Pernyataan kebijakan (*policy statements*) adalah pernyataan-pernyataan resmi atau artikulasi-artikulasi kebijakan publik. Yang termasuk dalam kategori ini adalah Undang-Undang legislatif, perintah-perintah dan dekrit presiden, peraturan-peraturan administratif dan pengadilan, maupun pernyataan-pernyataan atau pidato-pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan maksud dan tujuan pemerintah dan apa yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan itu.
4. Hasil kebijakan (*policy outputs*) lebih merujuk ke manifestasi nyata dari kebijakan publik, hal-hal yang sebenarnya dilakukan menurut keputusan-keputusan dan pernyataan-pernyataan kebijakan.

Masyarakat, baik yang diinginkan yang berasal dari tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah (Winarno, 2002 : 19-20).

Definisi sifat kebijakan publik diatas adalah jelas bahwa sebenarnya kebijakan itu tidak hanya dirumuskan lalu dibuat dalam suatu bentuk positif seperti Undang-Undang dan kemudian didiamkan dan tidak dilaksanakan atau diimplmentasikan, tetapi sebuah kebijakan publik harus dilaksanakan atau diimplementasikan agar mempunyai dampak atau tujuan yang diinginkan dan kemudian dievaluasi pelaksanaannya.



BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Populasi dan Sampel

Ericson (2008:156) dalam bukunya “memahami data statistik untuk ilmu sosial” mengatakan: “Populasi dapat berupa kumpulan dari setiap objek penelitian, pada dasarnya populasi adalah himpunan semua hal (keseluruhan realita sosial) yang ingin diketahui”.

Sedangkan sample berarti contoh, yaitu sebagian dari hal yang menjadi objek penelitian. Menurut Sapari Iman Asyari, yang dimaksud dengan sample adalah : “contoh yang dapat mewakili populasi atau cermin dari keseluruhan objek yang diteliti”.

Menurut Arikunto (2006:70) dalam bukunya prosedur penelitian: “Apabila subjeknya kurang dari 100 orang, lebih baik diambil semuanya sehingga penelitiannya merupakan penelitian populasi, selanjutnya jika subyeknya besar maka dapat diambil antara 10-15 % atau 20-25 % atau lebih”.

Berdasarkan penjelasan di atas maka yang menjadi populasi sekaligus sample yang penulis ambil 25 Orang personil kepegawaian yang terdapat di Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang.

B. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data maupun keterangan yang diperlukan, dalam penulisan ini penulis menggunakan :

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area (repository.uma.ac.id)8/8/23

1. Penelitian Kepustakaan

Yaitu mengumpulkan data-data yang diperlukan dan diperoleh dari buku-buku, artikel, mass media, dan lain sebagainya.

2. Penelitian Lapangan.

Yaitu penelitian yang dilakukan dengan turun kelapangan untuk mengadakan pengumpulan data-data yang berhubungan dengan penulisan skripsi ini melalui :

- Interview/wawancara dengan sumber-sumber yang dirasakan penulis dapat memberikan masukan.
- Pengamatan/observasi yaitu pengumpulan data dengan mengamati keadaan di lapangan secara langsung.

C. Variabel dan Definisi Operasional

Variabel penelitian merupakan salah satu unsur dari suatu penilaian. Dalam penelitian ini ada 1 variabel yaitu prosedur pendaftaran lembaga swadaya Masyarakat.

Prosedur pendaftaran lembaga swadaya Masyarakat adalah suatu sistem yang diterapkan oleh Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang dalam hal pelaksanaan pendaftaran lembaga swadaya Masyarakat.

D. Metode Analisis Data

Penganalisaan data yang diperoleh melalui penelitian harus dilaksanakan

hipotesis atau masalah yang telah dirumuskan, sehingga dapat dengan jelas kita

simpulkan apakah hipotesis diterima atau tidak.

Untuk menganalisa data yang diperoleh maka dipergunakan metode analisa sebagai berikut :

1. Analisa deskriptif yakni mengklasifikasikan data yang diperoleh sehingga dapat memberi gambaran terhadap permasalahan.
2. Analisa komperatif yakni membandingkan antara teori dan data-data yang diperoleh dari lapangan.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan hasil penelitian mengenai “Prosedur Pendaftaran LSM di Kesbang Kabupaten Deli Serdang, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Kantor Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang, sangat berpengaruh dalam kehidupan masyarakat terutama di bidang Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM). Dengan memberikan sosialisasi tentang prosedur permohonan pendaftaran SKT bagi LSM akan lebih memudahkan masyarakat yang akan mendirikan LSM.
2. Kantor Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang mempunyai Tugas Pokok dan Fungsi yaitu : Bidang Kesatuan bangsa, Bidang Hubungan Antar lembaga, Bidang Demokratisasi, dan Bidang Perlindungan Masyarakat.
3. Pada bidang Hubungan Antar Lembaga Kesbang Kabupaten Deli Serdang menjadi jembatan bagi LSM yang ada di Kabupaten Deli Serdang untuk mendapat monitoring, bimbingan, pengawasan dan sekaligus penilaian keberlangsungan LSM masa depan.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka penulis memberikan saran sebagai berikut

UNIVERSITAS MEDAN AREA Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli Serdang:

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)8/8/23

- a. Kantor Kantor Badan Kesatuan Bangsa Kabupaten Deli serdang, diharapkan lebih kreatif dan inovatif dalam memberikan sosialisasi tentang program LSM yang baik dan bermutu.
 - b. Memaksimalkan peran kesbang dalam monitoring dan evaluasi terhadap LSM yang ada di Kabupaten Deli Serdang.
 - c. Badan Kesbang Kabupaten Deli Serdang harus melakukan pengawasan yang intensif terhadap LSM dan sekaligus menertibkan LSM yang melanggar peraturan dan ketentuan yang berlaku sehingga akan merugikan pemerintah dan masyarakat.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
- a. Masyarakat LSM harus taat peraturan dan azas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sebagai LSM.
 - b. Masyarakat LSM harus lebih dirasakan keberadaannya ditengah-tengah masyarakat dalam hal memperjuangkan aspirasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Asyari, Sapari Imam, *Metodologi Penelitian Sosiologi*, Usaha Nasional, Surabaya, 2003.
- Arikunto, Suharsimi *Prosedur Penelitian*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Dewi, Ambarsari, *Kebijakan Publik dan Partisipasi Perempuan*. Pattirol. Jakarta, 2002.
- Ericson, BH. dan T. Nomsamchue, *Memahami Statistik Untuk Ilmu Sosial*, LP3ES, Jakarta, 2008.
- Handoko, T. Hani *Manajemen*, BPFE, Yogyakarta, 2001.
- Kartono, Kartini *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Alumni, Bandung, 2006.
- Ndraha, Talizuddin, *Pengertian Desa dan Pembangunan Desa*, Yayasan Karya Darma II, Jakarta, 2007.
- Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 886 Tahun 2008, Tugas Pokok, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang
- Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 33 Tahun 2012
- Poerdarminta, WJS, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka. Jakarta, 2003.
- Shadily, Hasan, *Sosiologi Untuk Masyarakat Indonesia*, PT. Pembangunan, Jakarta, 2000.
- Siagian, Sondang P. *Administrasi Pembangunan*, Gunung Agung, Jakarta, 2007.
- Soekanto, Soerjono, *Sosiologi Suatu Pengantar*, CV. Rajawali, Jakarta, 2002.
- Sunggono, Bambang, *Hukum dan Kebijakan Publik*. Sinar Grafika. Jakarta, 2004.
- Suryaningrat, Bayu, *Perumusan Kebijakan dan Koordinasi Pembangunan di Indonesia*. Bina Aksara. Jakarta, 2009.
- Sutopo dan Sugiyanto. *Analisis Kebijakan Publik*. Lembaga Administrasi Negara

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 8/8/23

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber

2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah

3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Winardi, *Azas-Azas Manajemen*, Alumni Bandung, 2009.

Winarno, Budi, *Kebijakan dan Proses Kebijakan Publik*. Media Pressindo. Yogyakarta, 2002.

